

EVALUASI PROGRAM DRAINASE DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Rega Agustira

NPP.30.0394

*Asdaf Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: regaagustira@mail.com

Pembimbing Skripsi: Luh Putu Vera Astri Pujayanti, AP, MH

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research was motivated by hydrometeorological disasters that often occur in East Belitung Regency. Hydrometeorological disasters can cause other disasters such as floods, tornadoes, and landslides. One of the efforts made by the government to deal with this is the existence of a drainage program to overcome prolonged flood disasters. **Purpose:** This study aims to evaluate the drainage program in flood disaster mitigation in East Belitung Regency, Bangka Belitung Islands Province. **Method:** The research method used by the author in this study is a qualitative research method with an inductive descriptive writing type. Meanwhile, the data collection techniques carried out are interviews, observations and documentation. Meanwhile, data analysis techniques are carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. **Result:** The Drainage Program in flood disaster mitigation in East Belitung Regency has been carried out properly because it has been implemented and carried out in accordance with procedures. However, some obstacles such as garbage, vegetation, and sedimentation in the drainage have resulted in the drainage function not running optimally in reducing the risk of flood disasters, especially during the rainy season. The factors that hinder the drainage program lie in the limited budget of the APBD and the lack of participation from public awareness. The efforts made are to build good relations between the community and related institutions in providing support for the implementation of flood mitigation through drainage programs and increasing personnel capacity through various forms of disaster response training. **Conclusion:** The evaluation of the drainage program in mitigating the Flood Disaster in East Belitung Regency has met the dimensions of CIPP (Context, Input, Process, Product) although there are still obstacles in the drainage program, it can be overcome from the efforts of the East Belitung Regency government.

Keywords: Evaluation, Drainage, Disaster Mitigation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatar belakangi oleh bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Kabupaten Belitung Timur. Bencana hidrometeorologi dapat menyebabkan bencana lainnya seperti banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Salah satu upaya yang di lakukan pemerintah untuk menangani hal tersebut dengan adanya program drainase demi menanggulangi bencana banjir yang berkepanjangan. **Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program drainase dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penulisan deskriptif induktif. Sedangkan teknik pengumpulan data yg dilakukan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara itu teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** program drainase dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Belitung Timur sudah terlaksana dengan baik dikarenakan sudah terselenggara dan dijalankan sesuai dengan prosedur. Namun beberapa hambatan seperti sampah, vegetasi, serta sedimentasi di drainase mengakibatkan fungsi drainase belum berjalan optimal dalam mengurangi risiko bencana banjir khususnya pada saat musim hujan. Faktor yang menjadi penghambat program drainase terletak pada anggaran APBD yang terbatas serta kurangnya partisipasi dari kesadaran masyarakat Upaya yang dilakukan ialah dengan membangun hubungan baik antar masyarakat dengan lembaga terkait dalam memberikan dukungan terlaksananya mitigasi bencana banjir melalui program drainase serta peningkatan kapasitas personel melalui berbagai bentuk pelatihan tanggap bencana. **Kesimpulan:** evaluasi program drainase dalam mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Belitung Timur telah memenuhi dimensi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) meskipun masih terdapat hambatan pada program drainase tersebut hal tersebut dapat diatasi dari upaya pemerintahan Kabupaten Belitung Timur.

Kata kunci: Evaluasi, Drainase, Mitigasi Bencana

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia bencana banjir menjadi permasalahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Minimalnya terdapat lima faktor penting yang menjadi sumber utama sebab terjadinya banjir di Indonesia yaitu faktor hujan, faktor rusaknya penyimpanan daerah aliran sungai (DAS), faktor kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, faktor pendangkalan sungai dan faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana.

Salah satu hal yang menjadi faktor yang berkontribusi penting menjadi penyebab banjir ialah intensitas hujan turun yang tinggi dan dalam durasi yang lama. Intensitas air yang besar ketika musim hujan tiba di Kabupaten Belitung Timur menyebabkan adanya genangan air yang merugikan di beberapa lokasi di Kabupaten Belitung Timur.

Akibat hujan lebat, sungai menjadi meluap selain itu minimnya daerah resapan air atau tanah tidak mampu menyerap air dalam jumlah banyak kemudian mengakibatkan air tersebut nantinya menjadi semakin tidak bisa di bendung dan terjadilah banjir

Banjir menjadi satu dari beberapa masalah bencana yang sering muncul di Kabupaten Belitung timur yang terjadi tidak hanya karena intensitas hujan yang tinggi saja. Intensitas hujan yang tinggi bukanlah penyebab daripada banjir yang sering terjadi di Kabupaten Belitung Timur tetapi ada

faktor lain yang terkait menjadi salah satu penyebab namun sifatnya masih bisa ditingkatkan fungsinya sebagai pendukung daripada pencegahan banjir.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 mengenai kesejahteraan umum dan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Belitung Timur berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Belitung Timur. Salah satu poin misi Kabupaten Belitung Timur yaitu membangun dan membenahi infrastruktur daerah untuk memperbaiki kinerja pelayanan. Dalam pencapaian poin membangun dan membenahi, salah satunya melalui pembangunan drainase yang baik. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur memiliki salah satu tugas dalam membangun dan membenahi infrastruktur dan di implementasikan dalam program drainase yang ada di Kabupaten Belitung Timur.

Masyarakat umum yang sejahtera berarti dari segi pelayanan publiknya terpenuhi dengan baik melalui infrastruktur daerahnya baik itu sebelum maupun sesudah terjadi suatu bencana. Saluran drainase merupakan bagian penting dari infrastruktur jalan dan merupakan pekerjaan tambahan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan teknis pada ruas jalan dalam. Saluran drainase berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan air baik yang berasal dari alam maupun buatan dari permukaan atau bawah permukaan suatu daerah.

Jika fungsi saluran drainase tidak optimal, maka akan berdampak serius pada kawasan tertentu terutama di dataran rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan saluran drainase di jalan raya menjadi tersumbat atau tidak mampu menampung air dengan baik adalah adanya sampah yang tidak diolah dan dibuang sembarangan oleh masyarakat

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan bencana banjir terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk juga salah satunya di Kabupaten Belitung Timur yang rawan bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi. Bencana hidrometeorologi dapat menyebabkan bencana lainnya seperti banjir, angin topan atau puting beung, serta tanah longsor.

Wilayah dari Kabupaten Belitung Timur termasuk kedalam dataran rendah dengan ketinggian rata-ratanya +- 18.56 mdpl (meter di atas permukaan laut). Karena letaknya berada di dataran rendah serta berdekatan dengan pesisir pantai atau laut, Kabupaten Belitung Timur memiliki risiko yang besar untuk terkena bencana banjir.

Didalam buku *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)* tahun 2021 Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2021 termasuk pada peringkat 88 dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia dengan jumlah skor 168.40 yang termasuk kategori tinggi. Dari tahun 2015 sampai dengan 2021 indeks risiko bencana Kabupaten Belitung Timur tidak mengalami perubahan yakni dengan skor 168.40 dan termasuk kategori tinggi. Sedangkan, indeks risiko per ancaman lebih tepatnya mengenai indeks bencana mengenai banjir di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 menempati urutan ke 45 dari 397 kabupaten/kota yang terdapat bencana banjir dengan skor 36.00 dan termasuk kategori tinggi. Jadi selama 5 tahun terakhir risiko bencana banjir di Kabupaten Belitung Timur belum mengalami penurunan.

Terkait intensitas hujan dan durasi hujan tersebut turun biasanya terjadi saat memasuki puncak musim hujan. Intensitas air yang besar ketika musim hujan tiba di Kabupaten Belitung Timur menyebabkan adanya genangan air yang merugikan di beberapa lokasi di Kabupaten Belitung Timur.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks program drainase, mitigasi bencana banjir dan beberapa hal yang masih terkait dengan penelitian. Penelitian

dengan judul Implementasi Program Pembangunan Drainase Dalam Upaya Penanggulangan Banjir Di Kota Sorong Papua Barat (Anggilully, 2022) menemukan bahwa Program Pembangunan Drainase berjalan responsif karena pembangunan tersebut dilakukan sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan. Akan tetapi dalam bentuk penanggulangan banjir belum optimal karena masalah banjir tidak dapat diatasi hanya dengan melibatkan satu instansi saja melainkan dibutuhkan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya. Penelitian Delvi menemukan bahwa efektifitas pemeliharaan drainase tidak berjalan dengan optimal karena kurangnya perhatian pemerintah desa dan masyarakat terhadap pemeliharaan drainase yang menyebabkan kenyamanan dimasyarakat terganggu (Delvi, 2020). Penelitian Sedyowati menemukan bahwa kesadaran masyarakat serta partisipasi aktif dalam mengurangi risiko bencana banjir memiliki unsur penting dalam menangani masalah banjir . Hal ini dapat meringankan beban dan tanggung jawab pemerintah atau pihak lain dalam menangani masalah banjir. Lambat laun, peran pemerintah bergeser hanya sebagai fasilitator (Sedyowati dkk., 2020). Penelitian Trisnawanti menemukan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana dalam mitigasi bencana disertai kualitas dan kesadaran masyarakat terhadap bencana yang kurang berpengaruh dalam efektifitas mitigasi bencana (Trisnawanti, 2022). Berdasarkan hasil penelitian Pramitha dkk tentang pentingnya ketersediaan dan fungsinya infrastruktur penanganan banjir seperti tanggul, pintu air dan drainase yang berperan penting dalam mengurangi risiko bencana khususnya bencana banjir. Meskipun alat-alat seperti early warning system tersebar dan berjumlah banyak namun apabila belum bisa menjangkau daerah rawan bencana banjir pengurangan risiko bencana banjir akan berjalan dengan kurang optimal (Pramitha dkk., 2020).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengevaluasi program drainase yang ada apakah telah mampu dalam kegiatan mitigasi bencana banjir, dengan penggunaan teori evaluasi program yang berbeda dengan penelitian Anggilully, delvi maupun sedyowati dkk. Selain itu fokus penelitian dalam penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana evaluasi program drainase yang ada di Kabupaten Belitung Timur dalam mitigasi bencana banjir menggunakan model evaluasi teori stufflebeam yakni CIPP (Context, Input, Process, Product)

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program drainase dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis penulisan deskriptif induktif dan menganalisis data melalui analisis data kualitatif yakni proses menyusun data (menggolongkannya dalam tema atau kategori) secara sistematis dari hasil wawancara, catatan selama dilapangan dan data-data lain yang didapatkan, agar meningkatkan pemahaman peneliti tentang hasil data tersebut supaya data bisa ditafsirkan atau diinterpretasikan. (Sugiyono, 2013). Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari kepala Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belitung Timur, Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR, Kepala PUSDALOPS-PB BPBD, Bendahara

Pengeluaran DPUPR, Teknisi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana DPUPR dan terakhir masyarakat (dalam hal masyarakat yang terdampak bencana banjir di sekitar drainase). Adapun pengumpulan data Kualitatif dilaksanakan dengan observasi tidak terstruktur, karena tidak menggunakan pedoman observasi dalam mengamati kegiatan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Belitung Timur maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur. Adapun analisis dalam mendapatkan data dan informasi yang sesuai penulis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan *conclusion drawing/verification*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan evaluasi program drainase yang ada di Kabupaten Belitung Timur menggunakan teori Stufflebeam model CIPP yang terdiri dari 4 dimensi yakni Context, Input, Process, dan Product. Adapun Pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Evaluasi Program Drainase dalam Mitigasi Bencana Banjir Ditinjau dari Dimensi Context

Penulis memilih evaluasi konteks dalam mengevaluasi program drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur yang diukur melalui aspek tujuan dan sasaran penyusunan program serta aspek dasar program drainase dalam mitigasi bencana banjir. Sehingga tujuan dari konteks evaluasi ini adalah untuk dapat mengidentifikasi tujuan serta sasaran terhadap program drainase secara tegas, tercatat, dan kontinu serta dasar perumusan kebijakan untuk membuat program drainase yang relevan serta menilai kebutuhan yang didasarkan atas tersusunnya suatu program dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

a). tujuan penyusunan program

Barometer tujuan penyusunan program diperoleh data hasil studi dokumentasi. Dokumen yang ditelaah berupa titik lokasi drainase yang telah dibangun serta dokumen yang berisi landasan hukum dalam pembangunan drainase yang telah dibangun dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur. Disebutkan pada dokumen tersebut bahwa penyusunan program harus memiliki tujuan yang ditetapkan berdasarkan analisis lingkungan strategis kondisi terkini Kabupaten Belitung Timur. Hasil studi dokumentasi ini ditopang dengan wawancara bersama Kepala Bidang Cipta Karya yang menangani program drainase yakni Bapak Lukman, ST yang menyatakan “Dalam program drainase ini yang menjadi sasaran penyusunan program drainase oleh pemerintah yaitu untuk memperlancar *run off out* atau air permukaan baik itu air hujan maupun air dari limpasan sehingga tidak menggenangi jalan atau pekarangan halaman rumah masyarakat”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dimaknai sebagai berikut tujuan dari penyusunan program drainase ialah untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan genangan air itu di jalan atau di pekarangan halaman rumah yang merugikan masyarakat. Data tersebut belum sejalan dengan hasil observasi peneliti berkenaan dengan tujuan program drainase karena masih ditemukan adanya genangan. Sebagai contoh pada musim hujan di beberapa titik drainase perkotaan kota Manggar yang padat penduduk terdapat genangan akibat sampah, lumpur, dan vegetasi yang menghalangi jalannya air untuk mengalir.

Analisis pada hasil studi dokumentasi, wawancara, dan observasi beserta pembahasannya menunjukkan bahwa evaluasi program drainase dalam mitigasi bencana belum memenuhi kriteria tujuan pemenuhan program pada dimensi konteks.

b). sasaran penyusunan program

Sasaran penyusunan kebijakan dimaknai sebagai perumusan tujuan program yang meliputi: 1) Kebutuhan masyarakat dalam mitigasi bencana banjir 2) Kebutuhan pemerintah; 3) Keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan.

Kriteria sasaran penyusunan program diperoleh data hasil studi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dokumen yang ditelaah berupa titik lokasi drainase yang telah dibangun serta dokumen yang berisi wilayah rawan bencana banjir di Kabupaten Belitung Timur yang didapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Penyusunan kebijakan harus memiliki sasaran yang ditetapkan berdasarkan analisis lingkungan strategis kondisi terkini Kabupaten Belitung Timur. Kemudian, wawancara yang dilakukan bersama Kepala Bidang Cipta Karya yang menangani program drainase yakni Bapak Lukman, ST yang menyatakan “Dalam program drainase ini yang menjadi sasaran penyusunan program drainase oleh pemerintah yaitu untuk memperlancar *run off out* atau air permukaan baik itu air hujan maupun air dari limpasan sehingga tidak menggenangi jalan atau pekarangan halaman rumah masyarakat”. Hasil wawancara tersebut diperiksa kredibilitasnya dengan studi dokumentasi. Dokumen yang ditelaah berupa penetapan sasaran program dalam rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur unit organisasi Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa evaluasi program telah memenuhi dimensi evaluasi kriteria sasaran penyusunan program dalam dimensi konteks.

c) Dasar Program drainase dalam Mitigasi Bencana Banjir

Kriteria dasar program drainase dalam mitigasi bencana banjir termasuk data hasil studi dokumentasi pada regulasi yang mengatur tentang program ini. Dokumen berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /PRT/M/2014 serta Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Analisis yang dilakukan kepada data yang dijadikan satu mulai dari studi dokumen kemudian dilakukan wawancara dan selanjutnya peneliti melakukan observasi lapangan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perspektif tujuan disertai sasaran penyusunan program sudah tegas, tercatat dan kontinu. Kendati demikian, Peraturan yang mengatur secara lebih rinci mengenai drainase dalam mitigasi bencana banjir Kabupaten Belitung Timur belum ada atau belum dibuat. Selanjutnya membahas dari segi dasar suatu program, penyusunan program drainase sudah memiliki kaitan hukum yang jelas. Secara *general*, sub penyusun evaluasi konteks mengenai drainase telah mencukupi standar kriteria evaluasi. Fakta nyata mengenai evaluasi pada sub penyusun konteks berdasarkan apa yang peneliti dapati melalui wawancara dengan informan terkait, studi berdasarkan dokumen yang ada, dan observasi lapangan telah sesuai dengan teori Stufflebeam.

Akhirnya dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa tujuan akhir program drainase dalam komponen konteks memenuhi kriteria penilaian standar.

3.2 Evaluasi Program Drainase Dalam Mitigasi Bencana Banjir Ditinjau Dari Dimensi *Input*

Dimensi *input* kajian evaluasi berarti berhadapan dengan informasi dan fakta yang diperoleh. Dimensi input mencakup 4 aspek, yaitu: struktur organisasi dan pelaksanaan program, prosedur pelaksanaan program, pendanaan pemerintah dan dukungan pemerintah. Berikut uraian temuan oleh peneliti yang mencakup keempat aspek yang telah disebutkan.

a. Struktur Organisasi dan Pelaksana program

studi dokumentasi disertai wawancara dengan Kepala Bidang Cipta Karya menyatakan bahwa program drainase memiliki struktur organisasi yakni PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang membawahi (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bertanggung jawab secara teknis mengenai drainase, serta terdapat 2 pengawas lapangan dalam program drainase tersebut. Jabatan struktur organisasi yang mengatur program drainase tersebut bisa mendapatkan tambahan jabatan bila diperlukan sesuai dengan keperluan berdasarkan perubahan keadaan di lapangan nantinya.

Berkaitan dengan fasilitas, informasi terungkap dari wawancara dengan Kepala Bidang Cipta Karya yakni bapak Lukman, ST yang menyatakan “salah satu fasilitas pendukung yang ada dalam pelaksanaan program ini misalnya selain saluran drainase kita juga sudah membangun *plat access* ke rumah warga yang dimana apabila masyarakat sudah membangun sendiri *plat access* nya maka kami akan ganti rugi biaya tersebut. Di lapangan jika diperlukan plat access atau *box* yang memotong jalan untuk memperlancar aliran air maka kami akan buat juga“. Kutipan wawancara tersebut menunjukkan terdapat fasilitas pendukung program drainase yang bertujuan memperlancar aliran air agar tidak terjadi genangan di sekitar lingkungan rumah warga. Kemudian, wawancara yang dilakukan dengan bapak RAFI DEAWIJAYA, A.Md menyatakan “Yang bisa kami jelaskan mengenai drainase ialah selain saluran drainase premier dan sekunder juga dibangun fasilitas seperti *plat access* yang berguna untuk mobilisasi kendaraan warga dari rumah mereka menuju jalan raya namun itu dibatasi ukurannya di setiap rumah. Adapaun *plat access* yang memotong jalan raya berfungsi dalam pengaturan laju air agar tidak tergenang.”

Kedua hasil wawancara tersebut diperiksa kredibilitasnya dengan studi dokumentasi. Dokumen yang ditelaah berupa penetapan sasaran program dalam rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur. Kesimpulan dari Hasil analisis data yang dipaparkan diatas menunjukkan bahwa implementasi program telah memenuhi dimensi evaluasi kriteria struktur organisasi dan pelaksana program dalam dimensi *input*.

b. Prosedur Pelaksanaan program

Salah satu aspek pada dimensi input ialah prosedur pelaksanaan program yang memiliki kriteria evaluasi sebagai berikut: memiliki standar operasional prosedur sesuai dengan tujuan program; ada metode pelaksanaan program; memiliki parameter atau indikator yang jelas terkait dengan drainase yang baik . Wawancara yang dilakukan dengan narasumber bapak Rafi Deawijaya, A.Md selaku Teknisi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur mengungkapkan “dalam pelaksanaan program tersebut telah ditentukan berdasarkan kualifikasi sesuai prosedur yang berlaku dimana prosedur tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah dan untuk penilaian individual biasanya ada persyaratan yang harus terpenuhi seperti halnya harus sudah ahli dalam pembangunan drainase“. Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dimana peneliti juga mendapatkan dan mengetahui informasi bahwa BPBD Kabupaten Belitung Timur juga ikut berpartisipasi dalam mitigasi bencana banjir yang berkaitan dengan drainase.

Standar Operasional bencana di BPBD terbagi dengan jelas sesuai bidangnya mulai dari adanya TRC (team reaksi cepat) hingga terdapat PUSDALOPS-PB (Pusat Pengendalian Data dan Operasi Penanggulangan Bencana). SOP di BPBD juga dilaksanakan seperti monitoring ke daerah rawan bencana khususnya banjir di sekitar drainase oleh regu piket di BPBD. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengetahui sejauh mana kepedulian masyarakat kepada sekitarnya terkhusus lingkungan disekitar drainase yang telah dibangun agar pengurangan risiko bencana banjir dapat tercapai.

Terkait dengan bencana, metode pelaksanaan program drainase harus proporsional dan berkoordinasi dengan pihak lainnya seperti pemerintah dan BPBD yang bisa memberikan masukan dan informasi terbaru terkait drainase yang telah dibangun apakah berfungsi dengan baik atau terdapat masalah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Kesimpulan dari apa yang peneliti paparkan diatas ialah pengaplikasian program telah memenuhi dimensi evaluasi kriteria prosedur pelaksanaan program dalam dimensi *input*

c. Pembiayaan Pemerintah

Terkait hal yang berkenaan dengan dana atau keuangan termasuk kedalam suatu dari bidang dimensi input yang mempunyai barometer evaluasi sebagai berikut: terdapat pengarahannya pada pembiayaan program dengan spesifik dan kontinu dalam artian tidak berhenti begitu saja; terdapat ketentuan daerah mana yang memiliki kelayakan dalam penerimaan bantuan; serta terdapat syarat alasan apa daerah yang disebut layak dalam mendapatkan bantuan. Hal tersebut didukung dengan wawancara yang dilakukan terhadap Ibu Dewi Yani, A.Md selaku bendahara pengeluaran yang mengungkapkan “Pengalokasian pembiayaan dari pemerintah sudah dilakukan dari awal pembangunan drainase hingga sekarang melalui APBD dan terus berkelanjutan. Hal ini karena anggaran yang ada memang tidak langsung bisa membiayai pembangunan drainase pada satu tahun full, jadi kami membangun drainase berbanding lurus dengan biaya yang ada walaupun itu dibawah target pembangunan”.

Selanjutnya juga membahas terkait dengan daerah atau lokasi mana yang layak dalam mendapatkan bantuan subsidi keuangan dari pemerintah. Lokasi yang layak mendapatkan subsidi keuangan dari pemerintah itu mempunyai syarat khusus yakni diutamakan bagi wilayah atau kawasan dalam kategori *urgent* dan memerlukan perhatian lebih yang selanjutnya akan dibuatkan daftar daerah tersebut oleh DPUPR dan disampaikan kepada Balai Peserna Pemukiman Wilayah atau BPPW Bangka Belitung serta di PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Setelah dilakukan pemeriksaan terkait hal tersebut selanjutnya dapat diputuskan lokasi manakah yang layak dalam mendapatkan subsidi bantuan dan dibuatkan drainase dari pihak terkait dan kepada lokasi dalam kategori tidak terpilih tetap akan dimasukkan kedalam usulan lokasi pembangunan drainase di tahun berikutnya.

Analisis pada hasil studi dokumentasi, wawancara, dan observasi beserta pembahasannya menunjukkan bahwa evaluasi program drainase belum memenuhi kriteria pembiayaan pemerintah pada dimensi *input*.

d. Dukungan Pemerintah

Pelaksanaan program drainase dalam mitigasi bencana banjir itu sendiri pastinya ada aspek dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini termasuk dalam dimensi input dengan kriteria evaluasi: ada fasilitas regulasi, *guide line* yang mendukung pelaksanaan program. Dalam wawancara yang dilakukan dengan narasumber Bapak Lukman, ST selaku Kepala Bidang Cipta Karya mengatakan “pemerintah Kabupaten Belitung Timur sampai saat ini *support* baik itu secara langsung maupun tidak langsung, kemudian selain itu juga tidak lepas dari dukungan DPRD sebagai pengawas dan memiliki tupoksi anggaran mereka tetap *support*. Untuk drainase sejauh ini walaupun dengan anggaran terbatas tetapi tetap di *support*.”

Kesimpulan dari wawancara dengan narasumber diatas bahwa *support* dari pemangku kepentingan adalah faktor penting dalam setiap program yang akan dilaksanakan hal ini bisa dikatakan kalau *support* dari pemangku jabatan adalah roda penggerak berjalannya program dan tanpanya mustahil akan berlangsung

3.3 Evaluasi Program Drainase Dalam Mitigasi Bencana Banjir ditinjau dari Dimensi *Process*

Dimensi *process* yang terkandung dalam penelitian evaluasi mengacu pada penanganan informasi dan fakta yang dikumpulkan selama penelitian. Data tersebut meliputi 5 aspek, yaitu: Konsistensi antara tujuan program dan pelaksanaannya, pemahaman rencana pelaksanaan program drainase, pelaksanaan program drainase, penggunaan anggaran, serta pemantauan dan transparansi pelaksanaan program drainase. Berikut pemaparan hasil temuan peneliti yang mencakup kelima aspek tersebut.

a. Kesamaan antara tujuan dan pelaksanaan program drainase

Kesamaan tujuan dan pelaksanaan program merupakan bagian dari dimensi proses yang memuat kriteria penilaian apakah pelaksanaan program sesuai dengan tujuan program. Harus ada kesesuaian antara tujuan dan pelaksanaan program agar tujuan pelaksanaan program tercapai. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan wawancara kepada informan terkait atau memiliki informasi dan keahlian mengenai hal tersebut.

Pada wawancara yang dilakukan dengan narasumber Kepala Bidang Cipta Karya yakni bapak Lukman, ST mengatakan “pemerintah sudah banyak melakukan berbagai bentuk upaya dalam mitigasi bencana banjir salah satunya melalui DPUPR Kabupaten Belitung Timur dengan pembangunan drainase yang bertujuan mengaliri air permukaan agar tidak tergenang di pekarangan rumah masyarakat. Selanjutnya kerja sama dengan BPBD Kabupaten Belitung Timur yang melakukan monitoring ke daerah rawan bencana banjir yang telah terdapat drainase dengan tujuan apakah drainase tersebut berjalan sesuai fungsinya atau terdapat masalah dalam beberapa waktu kedepan yang nantinya akan dilaporkan kepada kami.”

Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya mengurangi risiko bencana banjir. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah pekerjaan pembangunan drainase dan sudah berjalan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Belitung Timur yang ikut dalam mengawasi drainase tersebut berfungsi dengan yang diharapkan dalam mitigasi bencana banjir.

Kesimpulan yang penulis bisa ambil dari paparan ini bahwa evaluasi program dalam kriteria kesamaan antara tujuan dan pelaksanaan program drainase telah terpenuhi dalam konteks *process*.

b. Pemahaman Program drainase Pelaksana Program

Pemahaman kebijakan pelaksana program merupakan bagian dari dimensi proses yang memiliki kriteria penilaian yaitu tentang terlaksananya program. Terselenggaranya program dengan benar adalah hasil dari pemahaman program. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber bapak Rafi Deawijaya, A.Md selaku Teknisi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana mengungkapkan “dalam penyelenggaraan program sebenarnya sudah bisa dikatakan tercapai dengan baik karena dalam pelaksanaannya sudah dalam rentang 100% ditahun 2022 ini. Hal ini karena kami memilih penyedia yang memang sesuai standar kami dan mengejar target agar tidak ada pekerjaan yang menumpuk dan bisa secepatnya diselesaikan serta terciptanya masyarakat yang nyaman.”

Kesimpulan dari pemaparan diatas ialah evaluasi program dalam kriteria pemahaman program drainase pelaksana program telah terpenuhi dalam konteks *process*.

c. Pelaksanaan program drainase

Implementasi program merupakan salah satu aspek dari dimensi proses, yang memiliki kriteria penilaian antara lain: Program dilaksanakan sesuai prosedur pelaksanaan dan laporan pelaksanaan program secara berkala, laporan juga harus merupakan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan program yang baik dapat dikatakan baik apabila sesuai dengan prosedur pelaksanaannya serta dari laporan berkala yang dapat di pertanggungjawabkan, kita bisa melihat bagaimana proses berjalan dalam pelaksanaan program itu sendiri.

Pada pelaksanaan program drainase peneliti menemukan sebuah fakta menarik yakni drainase yang telah dibangun mengalami hambatan dalam tujuannya yakni adanya sampah dan sedimentasi tanah serta vegetasi yang tumbuh lebat menyebabkan aliran air menjadi berkurang atau bahkan terhenti. Hal ini karena *culture* masyarakat yang sering membuang sampah serta tidak peduli akan lingkungan sekitar mereka tinggal. Hal ini juga di benarkan oleh Kepala PUSDALOPS-PB Bapak Helmi Takbirullah Akbar S.Si yang mengatakan “ada beberapa *culture* di masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah rawan banjir *social culture* nya kurang baik. Jadi selama ini pengalaman kami kebanyakan dari mereka tidak peduli dengan keadaan sekitarnya yang mengakibatkan drainasenya tersumbat oleh sampah serta adanya sedimentasi.”

Berdasarkan data yang sudah dijabarkan di atas oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa masih adanya masyarakat yang kurang peka terhadap lingkungan sekitar khususnya mengenai sampah, padahal partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangatlah penting karena bencana bukan hanya kewajiban Dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan tetapi bencana adalah urusan semua pihak yang ada.

Dalam menanggapi adanya hambatan pada tujuan drainase yang telah dibangun pemerintah berupaya memberikan solusi terbaik agar tujuan dari program drainase sendiri dapat tercapai khususnya dalam mengurangi risiko bencana. Upaya yang dilakukan dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur sendiri untuk meningkatkan pelaksanaan mitigasi banjir melalui program drainase yakni mengajak kepala wilayah yang daerahnya rawan bencana banjir mulai dari camat, tokoh di masyarakat, lurah dan RT RW, dan kepala lingkungan beserta masyarakat wilayah tersebut untuk mengadakan sosialisasi pra bencana, tanggap bahaya dan risiko bencana banjir di Kabupaten Belitung Timur. Hal ini dapat dilakukan dengan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Belitung Timur seperti gotong royong

Selanjutnya melakukan kooperasi dengan OPD lain serta relawan-relawan untuk melaksanakan kegiatan pra bencana demi meminimalisir dampak risiko bencana banjir di Kabupaten Belitung Timur. Perlu dilakukan *collaborative governance* di antara pemangku kepentingan supaya koordinasi setiap struktur yang bertugas dalam penanggulangan bencana dapat berjalan optimal. Upaya terakhir yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yakni meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan personel penanggulangan bencana. Peningkatan kapasitas personel dapat dilakukan melalui *peer learning*, studi banding dengan OPD di daerah lain, dan praktek bersama dalam upaya melaksanakan langkah-langkah mitigasi bencana. Selain itu, *updating* teknik dan metode terkini dalam upaya tanggap bencana juga bisa meningkatkan kapasitas serta kesiapsiagaan dalam tanggap bencana khususnya banjir.

Kesimpulan dari pemaparan diatas berkaitan evaluasi program kriteria pelaksanaan program drainase belum terpenuhi dalam konteks *process*.

d. Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran adalah salah satu aspek dimensi proses yang memiliki kriteria penilaian berupa anggaran yang digunakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan . Anggaran itu sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program karena tanpa anggaran

sulit sekali program akan berjalan. Dalam hal ini, kita perlu mengetahui apakah anggaran yang tersedia telah digunakan sesuai dengan program yang ditetapkan atau tidak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan Ibu Dewi Yani, A.Md selaku bendahara pengeluaran mengatakan “Penggunaan anggaran terutama APBD dalam pelaksanaan program drainase tentunya telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dengan melakukan pembangunan drainase yang sempat belum selesai di tahun sebelumnya atau menyelesaikan pembangunan drainase di lokasi baru. Meskipun dengan anggaran terbatas kami di sini menggunakannya dengan bijak dan hasil yang maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa dalam penggunaan anggaran pemerintah terkait pelaksanaan program drainase sudah sesuai. Informasi juga tersedia dalam bentuk anggaran dan pendanaan pembangunan drainase serta titik koordinat drainase yang penulis lampirkan pada bagian lampiran.

e. Pengawasan dan Transparansi Pelaksanaan Program

Pengawasan dan transparansi implementasi kebijakan merupakan bagian dari dimensi proses yang memiliki kriteria penilaian yaitu: ada tim evaluator/ pengawas kebijakan atau program yang kredibel, dan ada laporan program atau kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah. Tentunya dalam implementasi kebijakan, implementasi kebijakan atau program harus diawasi dan transparan agar kebijakan atau program tersebut dapat berjalan dengan lancar

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan Rusman, S.AP selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belitung Timur mengatakan “BPBD melaksanakan monitoring ke daerah-daerah rawan bencana dan pada musim hujan seperti saat ini kami lebih sering ke daerah rawan banjir terutama yang berada di dekat drainase. Dari monitoring tersebut kita akan tahu apakah penyebab banjir itu berasal dari drainase atau ada faktor lain. Nantinya laporan tersebut akan kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Belitung Timur beserta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur untuk ditindak lanjuti.”

Dari wawancara bersama Kepala Pelaksana BPBD dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pengawasan tidak hanya bisa dilakukan dari Dinas yang menciptakan program tapi bisa melalui kerja sama dengan Dinas atau organisasi terkait. Melalui pemantauan ini, lampiran kebijakan atau program disiapkan dan disampaikan secara berkala kepada pemerintah. Simpulan dari pemaparan diatas evaluasi program drainase kriteria pengawasan dan transparansi pelaksanaan program dalam konteks *process* telah terpenuhi.

3.4 Evaluasi Program Drainase Dalam Mitigasi Bencana Banjir Ditinjau Dari Dimensi *Product*

Dimensi *product* di dalam penelitian evaluasi mencakup 2 aspek yaitu: hasil pelaksanaan program untuk masyarakat dan hasil pelaksanaan program bagi pemerintah yang mana *product* ini adalah dimensi terakhir dalam teori evaluasi CIPP.. Berikut ini merupakan penjabaran terhadap temuan peneliti yang meliputi kedua aspek tersebut.

a. Hasil Pelaksanaan program drainase untuk Masyarakat

Hasil pelaksanaan program drainase perkotaan merupakan bagian dari dimensi produk yang memuat kriteria penilaian yaitu: masyarakat memiliki sistem drainase di sekitar wilayah rumah mereka dan dapat mengurangi risiko bencana banjir karena faktor genangan yang menyebabkan banjir bisa tidak terjadi. Kesimpulannya bahwa evaluasi program kriteria hasil pelaksanaan program drainase untuk masyarakat telah terpenuhi dalam konteks *product*.

b. Hasil Pelaksanaan Program bagi Pemerintah

Hasil pelaksanaan program bagi pemerintah merupakan wilayah dimensi produk yang memiliki kriteria penilaian yakni: memudahkan mobilisasi air permukaan menuju sungai serta mengurangi risiko bencana banjir di masyarakat. Drainase juga menambah keindahan suatu wilayah agar terlihat rapi dan teratur. Kesimpulannya bahwa evaluasi program kriteria hasil pelaksanaan program drainase bagi pemerintah telah terpenuhi dalam konteks *product*.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Drainase memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka mengurangi risiko bencana banjir dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman. Drainase juga merupakan salah satu sarana penting dalam menata pemukiman masyarakat serta perkotaan. Penulis menemukan temuan penting yakni masalah banjir karena sumbatan di drainase yang ada di Kabupaten Belitung Timur disebabkan pula karena kurangnya perhatian pemerintah serta masyarakat yang terdampak banjir di sekitar drainase. Sama halnya dengan temuan Delvi bahwa masalah dalam efektifitas pemeliharaan drainase karena kurangnya perhatian pemerintah desa dan masyarakat terhadap pemeliharaan drainase (Delvi, 2020), Pemeliharaan drainase di Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan belum dilakukan dengan efektif. Terbukti dengan banyaknya tumpukan sampah, timbunan tanah, dan rumput-rumput yang tumbuh secara liar di dalam saluran air drainase, yang mengakibatkan genangan air tersumbat dan berimbas pada banjir.

Layaknya program lainnya, program drainase di Kabupaten Belitung Timur ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya dalam mengatasi masalah banjir tidak bisa diatasi hanya dengan satu instansi saja namun diperlukan kerjasama dengan instansi lainnya, layaknya temuan Anggilully (Anggilully, 2022). Selanjutnya karakteristik dari program ini yakni program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, jadi yang membuatnya lebih menarik lagi adalah alokasi anggaran dan dukungan serta pemahaman dari masyarakat sekitar drainase terhadap program ini berperan sangat signifikan dalam mensukseskan mitigasi bencana banjir yang ada di Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan hasil penelitian sedyowati,dkk (Sedyowati dkk., 2020). Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu menjadi sarana pengurangan risiko bencana yang berperan besar menurunkan jumlah kejadian banjir yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Layaknya penelitian Pramitha dkk yang menemukan adanya suatu manajemen risiko bencana banjir untuk mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan berupa pembuatan sarana dan prasarana pengendali banjir dan pengadaan alat sistem peringatan dini (Pramitha dkk, 2020).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka secara teoritis dapat disimpulkan bahwasanya evaluasi program drainase dalam mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Belitung Timur telah memenuhi dimensi CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

Penelitian yang peneliti laksanakan menemukan fakta bahwa ada hal-hal penting yang harus diterapkan saat mengimplementasikan program demi kebaikan semua pihak. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian dan prioritas yang lebih dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk

mengatasi kendala-kendala pelaksanaan Program Drainase dalam mitigasi bencana secara efektif dan efisien.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang dilaksanakan tidak lebih dari 1 bulan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program drainase dalam mitigasi bencana di Kabupaten Belitung Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belitung Timur jajarannya serta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belitung Timur yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggilully, Nur K. G. 2022. "Implementasi Program Pembangunan Drainase Dalam Upayah Penanggulangan Banjir Di Kota Sorong Papua Barat". Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Eato dkk. 2017. *Strategi Penanganan Banjir Berbasis Mitigasi Bencana Pada Kawasan Rawan Bencana Banjir Di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Universitas Sam Ratulangi*. Vol. 4. No. 3. 108-120. DOI: <https://doi.org/10.35793/sp.v4i3.17333>
- Nst, Delvi Salama. 2020. *Efektifitas pemeliharaan drainase terhadap kenyamanan lingkungan masyarakat di Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan*. (Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan) Diakses dari <http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/2649/>
- Pramitha dkk. 2020. "Efektivitas infrastruktur perkotaan dalam penanganan risiko banjir di Kota Surakarta" . *REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif* 15(1). DOI: 10.20961/region.v15i1.23258
- Sedyowati dkk. 2020. *Efektifitas Saluran Drainase dalam Menurunkan Risiko Banjir dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dataran Banjir*.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Trisnawanti, ST Indah. 2022. "Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat". Institut Pemerintahan Dalam Negeri